



## Implikasi Hukum Masyarakat Dalam Penegakan Keadilan Sosial di Era Modern: Studi Kasus Putusan Nomor 93/Puu-Xx/2022

Septi Indah Lestari<sup>1</sup>, Novia Putri Rahmadani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Semarang

### Abstrak

Received: 3 Oktober 2024  
Revised: 12 Oktober 2024  
Accepted: 30 Oktober 2024

This article discusses the complex implications of community law in upholding social justice in the modern era. It is argued that community law can help overcome social, economic and political inequality by integrating local values with universal principles of justice. The importance of achieving a balance between local traditions and general principles of social justice through dialogue and cooperation between stakeholders. Increasing public legal awareness, legal reform, legal education, and community participation are identified as important steps in creating a more just and just society. Collaboration between government, legal institutions, civil society and the private sector is considered essential to create a society that is more just, inclusive and empowers all individuals in the ever-changing modern era. The protection of human rights in the legal framework of society in the modern era is also emphasized, highlighting the role of the younger generation in safeguarding human rights in the legal context of modern society. Normative and descriptive research methods are used to analyze the role of community law in overcoming social, economic and political inequality in modern society.

**Keywords:** community law, social justice, human rights

(\*) Corresponding Author: [septi26485@students.unnes.ac.id](mailto:septi26485@students.unnes.ac.id), [noviaputrirahmadani11@students.unnes.ac.id](mailto:noviaputrirahmadani11@students.unnes.ac.id)

**How to Cite:** Lestari, S., & Rahmadani, N. (2024). Implikasi Hukum Masyarakat Dalam Penegakan Keadilan Sosial di Era Modern: Studi Kasus Putusan Nomor 93/Puu-Xx/2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 647-648. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9131>

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, konsep keadilan sosial menjadi topik penting di berbagai belahan dunia. Saat ini, pemeliharaan keadilan sosial telah mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi, globalisasi dan perubahan sosial yang pesat. Tugas hukum adalah melindungi kepentingan rakyat. Hukum harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan baik secara rutin, damai, maupun melanggar hukum. Dalam penegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Keadilan bersifat sangat subyektif, individualistis dan tidak universal. Penegakan hukum memerlukan *trade-off* antara ketiga elemen tersebut, meskipun dalam praktiknya kompromi relatif antara ketiga isu tersebut sangat sulit dilakukan. Namun, seiring dengan munculnya peluang baru untuk memperjuangkan keadilan sosial, terdapat juga tantangan dan hambatan yang harus diatasi. Salah satu bidang yang mempunyai pengaruh besar adalah hukum komunitas atau hukum sosial, yang mendukung terpeliharanya keadilan sosial dalam konteks yang lebih luas.

Hukum masyarakat mengacu pada hukum yang bersumber dari norma, nilai, dan tradisi sosial. Hal ini dapat mencakup hukum adat, hukum agama, dan adat



istiadat setempat yang memengaruhi cara masyarakat berperilaku dan berinteraksi dalam komunitasnya. Saat ini, hukum masyarakat tersebut memainkan peran penting dalam menjaga keadilan sosial, terutama karena hukum tersebut berkaitan erat dengan identitas budaya dan moralitas lokal. Namun, permasalahan muncul ketika undang-undang Masyarakat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional atau internasional yang lebih modern dan formal. Misalnya, dalam konteks hak asasi manusia dan kesetaraan gender, hukum suatu masyarakat tertentu mungkin mempunyai perspektif yang berbeda dengan norma-norma global. Hal ini dapat menimbulkan kontradiksi dalam penerapan undang-undang dan mempengaruhi upaya pencapaian keadilan sosial. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan Komunitas dapat menjadi alat yang efektif untuk memajukan keadilan sosial. Jika nilai-nilai lokal dilekatkan pada prinsip keadilan sosial, peraturan perundang-undangan Masyarakat dapat menginspirasi reformasi peraturan perundang-undangan yang lebih inklusif dan adil. Hal ini sangat penting di negara-negara dengan pluralisme budaya dan hukum adat yang kuat.

Zaman modern juga membawa perubahan sosial yang pesat yang didorong oleh teknologi dan komunikasi digital. Hal ini menciptakan peluang bagi masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya dan menuntut keadilan sosial. Namun, hal ini dapat memicu ketegangan antara hukum sosial dan prinsip hukum modern, terutama ketika media sosial digunakan untuk mendorong isu-isu kontroversial yang melibatkan norma-norma tradisional. Oleh karena itu, implikasi hukum masyarakat terhadap terpeliharanya keadilan sosial di zaman modern sangatlah kompleks. Keseimbangan antara tradisi dan prinsip-prinsip umum keadilan sosial memerlukan pendekatan yang bijaksana dan inklusif. Dalam hal ini, penting untuk mengakui dan menghormati keragaman budaya, sekaligus memastikan penghormatan terhadap hak-hak dasar dan keadilan sosial bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang budaya atau agama mereka. Untuk mencapai keseimbangan ini memerlukan dialog dan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan pengadilan. Dengan demikian, hukum masyarakat dapat menjadi salah satu elemen yang memperkuat terwujudnya keadilan sosial di zaman modern, bukan malah menjadi penghambat kemajuan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian normatif digunakan untuk menganalisis secara kritis berbagai peraturan dan kebijakan. Pendekatan ini melibatkan studi mendalam terhadap berbagai dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan daerah, dan putusan pengadilan, untuk mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum yang ada dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sementara itu, metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara detail dinamika sosial dan interaksi sosial. Dengan menggabungkan kedua metode tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif.

## **PEMBAHASAN**

**Peran Hukum Masyarakat dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial, Ekonomi, dan Politik di Masyarakat Modern**

Pada dasarnya setiap masyarakat ingin mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik, dengan harapan dapat mencapai kehidupan yang lebih maju dan sejahtera. Keinginan untuk berubah merupakan awal dari proses modernisasi. Pengertian modernisasi sangatlah luas dan tidak dapat didefinisikan secara utuh. Hal ini ditandai dengan menyikapi dan menekankan modernisasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang diinginkan dalam perubahan tersebut. Hukum masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam mengatasi ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat modern, dengan cara membentuk kerangka kerja yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip keadilan yang universal. Di banyak negara, terutama yang memiliki keragaman budaya tinggi, hukum masyarakat adalah sumber utama norma dan aturan yang mengatur interaksi sosial, kepemilikan, serta hak dan kewajiban anggota komunitas. Dengan pemahaman yang mendalam tentang dinamika lokal, hukum masyarakat dapat menjadi jembatan yang efektif untuk mengurangi ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam Aspek sosial, hukum masyarakat memainkan peran penting dalam menciptakan kohesi sosial dan mendorong nilai-nilai solidaritas. Misalnya, dalam banyak budaya, ada tradisi gotong royong atau tolong-menolong yang menjadi dasar bagi hubungan antaranggota komunitas. Tradisi ini dapat menjadi alat yang kuat untuk mengurangi ketimpangan sosial dengan memastikan bahwa anggota masyarakat yang lebih rentan atau kurang mampu mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Peran hukum masyarakat dalam mengatasi ketimpangan sosial terletak pada kemampuannya untuk mengatur hubungan antarkelompok dan individu berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, dan solidaritas. Hukum masyarakat, yang sering mencerminkan tradisi dan nilai-nilai lokal, dapat menjadi fondasi untuk mendorong kesetaraan dan saling mendukung di dalam komunitas. Salah satu cara hukum masyarakat mengatasi ketimpangan sosial adalah dengan mendorong praktik gotong royong atau tolong-menolong, di mana anggota masyarakat saling membantu dalam kegiatan sosial dan ekonomi, sehingga tercipta ikatan sosial yang kuat. Hukum masyarakat juga berperan dalam mengurangi ketimpangan melalui mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas. Dengan adanya mekanisme ini, konflik dapat diselesaikan dengan cara yang inklusif, mempertimbangkan perspektif dan kepentingan semua pihak. Ini membantu mencegah marginalisasi kelompok-kelompok tertentu dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke keadilan. Selain itu, hukum masyarakat dapat memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan bagi kelompok yang rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan lansia, melalui norma-norma yang mengatur perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.

Dalam aspek ekonomi, Hukum masyarakat memainkan peran penting dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dengan cara memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil dan mendukung ekonomi berbasis komunitas. Salah satu caranya adalah melalui konsep kepemilikan komunal, di mana sumber daya alam seperti tanah, air, dan hutan dianggap sebagai milik bersama komunitas, bukan milik individu atau kelompok tertentu. Hal ini dapat mencegah konsentrasi kekayaan dan kekuasaan ekonomi dalam tangan segelintir orang atau perusahaan besar. Dengan kepemilikan komunal, hasil dari sumber daya ini didistribusikan secara proporsional kepada seluruh anggota masyarakat, sehingga mengurangi

ketimpangan ekonomi. Dalam banyak kasus, hukum masyarakat mendorong anggota komunitas untuk membantu satu sama lain dalam menghadapi krisis ekonomi, seperti saat panen gagal atau biaya kesehatan yang tinggi, melalui mekanisme bantuan bersama atau sistem keuangan komunal. hukum masyarakat dapat memberikan kerangka untuk distribusi sumber daya yang lebih adil dan berkelanjutan. Di banyak komunitas adat, ada konsep kepemilikan komunal atau hak ulayat yang memastikan bahwa sumber daya alam dikelola untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk keuntungan individu atau kelompok tertentu. Selain itu, hukum masyarakat dapat mendorong sistem ekonomi yang lebih berbasis komunitas, yang dapat memberikan peluang ekonomi kepada kelompok-kelompok yang mungkin terpinggirkan dalam sistem ekonomi konvensional.

Dalam aspek politik, hukum masyarakat dapat menjadi alat pemberdayaan yang efektif. Ketika anggota masyarakat memiliki peran aktif dalam menentukan aturan dan norma yang mengatur kehidupan mereka, ini dapat meningkatkan partisipasi politik dan memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang sering kali terpinggirkan dalam sistem politik yang lebih formal. Peran hukum masyarakat dalam mengatasi ketimpangan politik di masyarakat modern dapat dilihat melalui peningkatan partisipasi warga, pemberdayaan komunitas, dan pengakuan terhadap hak-hak adat dalam pengambilan keputusan politik. Ketimpangan politik sering kali muncul ketika ada kesenjangan dalam akses terhadap proses politik, hak untuk didengar, atau kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan. Hukum masyarakat, dengan fokus pada nilai-nilai lokal dan tradisi, dapat membantu mengatasi ketimpangan ini dengan memberikan kerangka kerja untuk partisipasi yang lebih inklusif. Dalam banyak masyarakat adat, keputusan politik tradisional sering kali diambil melalui musyawarah dan konsensus, memastikan bahwa setiap suara memiliki kesempatan untuk didengar dan dipertimbangkan. Praktik ini dapat memberikan alternatif yang kuat terhadap sistem politik yang cenderung terpusat atau hierarkis, di mana hanya segelintir orang yang memiliki akses ke kekuasaan. Dengan mendorong partisipasi masyarakat secara langsung dan memperkuat hak-hak komunitas untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, hukum masyarakat dapat membantu meratakan arena politik, memungkinkan kelompok-kelompok yang biasanya terpinggirkan untuk memiliki suara yang lebih kuat.

Peran hukum masyarakat dalam mengatasi ketimpangan juga datang dengan tantangan dan batasan. Ada risiko bahwa hukum masyarakat dapat memperkuat praktik diskriminatif atau mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara menghormati tradisi lokal dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan tetap terjaga. Pendekatan yang menggabungkan elemen positif dari hukum masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum nasional atau internasional dapat menjadi cara yang efektif untuk mengatasi ketimpangan sambil tetap menghargai keberagaman budaya. Secara keseluruhan, peran hukum masyarakat dalam mengatasi ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik sangatlah penting. Dengan pendekatan yang bijaksana dan inklusif, hukum masyarakat dapat menjadi katalis bagi perubahan positif, memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan solidaritas lokal dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan setara di era modern.

### **Kesesuaian antara Nilai-Nilai Hukum Masyarakat dengan Prinsip-Prinsip Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Modern**

Kesesuaian antara nilai-nilai hukum masyarakat dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam sistem hukum modern sering kali menjadi topik yang kompleks dan menantang. Menurut C.A.J Cruli, bantuan hukum adalah bantuan yang diberikan oleh para ahli kepada mereka yang memerlukan untuk mewujudkan atau melaksanakan haknya dan mendapat perlindungan hukum. Pada dasarnya, hukum masyarakat meliputi tradisi, adat istiadat, dan norma-norma yang berkembang di komunitas tertentu, yang seringkali berakar pada sejarah dan budaya lokal. Di sisi lain, prinsip-prinsip keadilan sosial dalam sistem hukum modern umumnya mengacu pada konsep keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia yang lebih luas, yang berlaku secara universal. Untuk mencapai kesesuaian antara keduanya, penting untuk mengakui bahwa hukum masyarakat dapat menjadi sumber yang kaya akan nilai-nilai keadilan dan solidaritas. Dalam banyak komunitas tradisional, konsep gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan menjadi inti dari norma sosial mereka. Nilai-nilai ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang mendorong kerja sama, inklusivitas, dan distribusi sumber daya yang adil.

Namun tantangan muncul ketika ada ketidaksesuaian antara hukum masyarakat dan prinsip-prinsip keadilan sosial yang lebih modern. Beberapa hukum masyarakat mungkin mencerminkan pandangan yang diskriminatif atau patriarkal, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender atau hak asasi manusia. Dalam kasus seperti ini, sistem hukum modern perlu menavigasi dengan hati-hati untuk memastikan bahwa nilai-nilai lokal dihormati, tetapi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan sosial yang fundamental. Misalnya, beberapa praktik tradisional mungkin perlu disesuaikan atau dihapus jika terbukti melanggar hak asasi manusia atau menciptakan ketimpangan. Selain itu, sistem hukum modern juga dapat memanfaatkan aspek-aspek positif dari hukum masyarakat untuk memperkuat keadilan sosial. Misalnya, pendekatan yang menghormati keberagaman budaya dan mendorong dialog antara norma lokal dan prinsip universal dapat membantu menciptakan kerangka kerja hukum yang lebih inklusif. Dengan mengakui peran penting yang dimainkan oleh hukum masyarakat dalam membentuk identitas budaya dan sosial, sistem hukum modern dapat menciptakan jembatan yang menghubungkan tradisi dengan modernitas.

Dalam hal ini kesesuaian antara nilai-nilai hukum masyarakat dan prinsip-prinsip keadilan sosial dapat dicapai melalui pendekatan yang mengutamakan dialog dan kolaborasi. Pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk memahami dan mengakomodasi nilai-nilai lokal sambil memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan sosial yang lebih luas tidak dikompromikan. Ini memerlukan pendekatan yang fleksibel dan sensitif terhadap konteks budaya, dengan tujuan menciptakan sistem hukum yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

### **Perlindungan Hak Asasi Manusia Terjamin Dalam Kerangka Hukum Masyarakat Di Era Modern**

Perlindungan hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam kerangka hukum masyarakat di era modern, di mana berbagai mekanisme telah ditetapkan dalam perundang-undangan dan institusi hukum untuk menjamin hal tersebut. Di

Indonesia, contohnya, terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai hak asasi manusia, seperti Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Melalui undang-undang tersebut, warga negara diberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak dasar mereka. Selain perundang-undangan, terdapat juga lembaga-lembaga yang dibentuk dengan tujuan khusus untuk melindungi hak asasi manusia. Contohnya adalah Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang memiliki mandat untuk mengawasi dan melindungi hak-hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu, terdapat juga lembaga seperti Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, dan Komisi Perlindungan Saksi dan Korban, yang masing-masing bertugas untuk melindungi hak-hak khusus kelompok rentan dalam masyarakat. Dengan adanya mekanisme seperti undang-undang yang mengatur hak asasi manusia dan lembaga-lembaga yang bertugas untuk melindunginya, diharapkan bahwa hak-hak asasi manusia dapat terjamin dan dilindungi dengan baik dalam masyarakat Indonesia.

Di era modern, negara hukum mempunyai satu ciri yang sangat penting, yaitu kewajiban untuk secara tegas melindungi hak asasi manusia seluruh warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap orang mempunyai hak-hak yang tidak dapat diingkari oleh negara atau pihak lain, dan bahwa perlindungan terhadap hak-hak tersebut merupakan tanggung jawab utama negara. Perlindungan hak asasi manusia tidak hanya sekedar kewajiban moral, tetapi juga merupakan prasyarat bagi keberlanjutan dan keseimbangan hak individu dan negara. Namun realitas lokal seringkali menunjukkan bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi di banyak tempat, baik dalam skala kecil maupun besar. Penanggulangan pelanggaran HAM merupakan tantangan kompleks bagi supremasi hukum karena melibatkan berbagai faktor seperti budaya, politik, ekonomi, dan masyarakat. Meski demikian, pemerintah masih berupaya memperbaiki sistem hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Penyempurnaan sistem hukum antara lain meliputi penyusunan, penyempurnaan, dan penguatan peraturan terkait hak asasi manusia serta perlindungan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas otoritas peradilan, termasuk kepolisian, kejaksa dan sistem peradilan, agar dapat menangani pelanggaran hak asasi manusia secara lebih efektif. Selain upaya pemerintah, kunci keberhasilan perlindungan hak individu adalah kesadaran warga negara akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Pendidikan dan advokasi hak asasi manusia harus dilakukan secara terus menerus melalui program pelatihan formal serta kampanye sosial dan media massa. Masyarakat harus mampu mengakui, memahami dan memperjuangkan hak-haknya dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Peran generasi muda dalam menjaga kelangsungan dan keseimbangan hak individu dan negara serta menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam kerangka hukum masyarakat sangat penting di zaman modern. Mereka mempunyai potensi besar untuk menjadi agen perubahan, memberikan dampak positif dalam memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia dan mengatasi tantangan yang muncul. Generasi muda adalah agen perubahan dengan visi segar dan keberanian untuk mengambil langkah inovatif demi hak asasi manusia. Mereka peka terhadap

perkembangan permasalahan sosial dan kemanusiaan serta memiliki keinginan untuk melakukan perubahan signifikan di masyarakat. Dengan kepemimpinan dan kreativitasnya, generasi muda dapat menciptakan solusi baru untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks yang terus berubah. Selain itu, generasi muda memiliki akses luas terhadap teknologi dan media sosial, yang dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia dan menggalang dukungan masyarakat.

Partisipasi aktif generasi muda dalam kegiatan sosial, organisasi advokasi dan forum diskusi juga merupakan alat yang efektif untuk memantau implementasi kebijakan hak asasi manusia dan mengatasi pelanggaran yang terjadi. Dengan mengambil peran sebagai pengamat, pemrakarsa dan aktivis, generasi muda dapat membantu memperkuat mekanisme perlindungan hak asasi manusia dan menekankan pentingnya keadilan, kebebasan dan martabat manusia dalam seluruh kebijakan dan kegiatan negara. Namun, agar kaum muda dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, mereka harus memiliki pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta keterampilan advokasi, negosiasi, dan kepemimpinan. Pendidikan hak asasi manusia harus dimasukkan dalam pendidikan formal dan non-formal, serta pendidikan hak asasi manusia dan lokakarya reguler untuk generasi muda. Generasi muda mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga kelangsungan dan keseimbangan hak antara masyarakat dan negara serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka hukum masyarakat modern. Hanya dengan kerja sama antargenerasi dan komitmen bersama kita dapat menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis yang menghormati hak asasi manusia semua orang.

### **Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Yang Lebih Baik Dapat Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Kesadaran hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang sah memainkan peran penting dalam menjaga martabat dan perlindungan individu dalam masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang baik cenderung menghormati hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi, beragama, berserikat, dan perlindungan dari diskriminasi. Di Indonesia, dimana konflik sosial sering terjadi, perlindungan hak asasi manusia yang kuat menjadi semakin penting. Dalam konteks konflik, peran hukum menjadi penting untuk menjamin keadilan dan perdamaian berkelanjutan. Namun, banyak faktor yang seringkali membatasi efektivitas perlindungan hukum hak asasi manusia. Salah satunya adalah melemahnya sistem peradilan yang mencakup rendahnya akses terhadap keadilan, lambatnya proses hukum, dan tidak seimbanginya perlindungan hukum. Akibatnya, individu mungkin kesulitan mengakses keadilan dan ganti rugi atas pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami. Korupsi juga menjadi kendala utama dalam upaya perlindungan hak asasi manusia melalui hukum. Praktik korupsi dalam sistem hukum dapat menimbulkan ketidakadilan, dimana kepentingan tertentu dapat memanipulasi atau mempengaruhi hakim atau petugas polisi, sehingga membahayakan hak individu.

Selain itu, kurangnya kapasitas lembaga penegak hukum merupakan hambatan dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia yang efektif. Kelemahan dalam investigasi, penuntutan dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia seringkali disebabkan oleh kurangnya sumber daya, keterbatasan teknis

dan kurangnya pelatihan pengacara. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diperlukan langkah-langkah konkrit untuk memperkuat sistem hukum, memberantas korupsi dan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum. Hal ini mencakup reformasi kebijakan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pemberian pelatihan penting bagi para pengacara.

Pentingnya pendidikan dan peningkatan kesadaran hukum warga negara juga tidak boleh diabaikan. Dengan meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia dan makna keadilan dalam masyarakat, diharapkan masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia secara lebih konsisten dan efektif. Meskipun kesadaran akan hak asasi manusia memainkan peran penting dalam menjaga martabat dan perlindungan individu, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang efektif dan berkelanjutan dalam kerangka hukum masyarakat di Indonesia.

berikut langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia merupakan landasan yang sangat penting untuk memastikan penghormatan dan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak individu antara lain sebagai berikut:

- a) Reformasi hukum merupakan langkah awal yang penting. Dengan memperbaiki kerangka hukum yang mendukung perlindungan hak asasi manusia, negara dapat memperkuat dasar hukum untuk perlindungan hak-hak individu. Reformasi ini mencakup pembuatan, penyempurnaan, dan penegakan hukum yang mendukung hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Langkah-langkah nyata seperti merevisi undang-undang yang tidak lagi memenuhi standar hak asasi manusia internasional dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses peradilan merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat kerangka hukum.
- b) Memperkuat lembaga penegak hukum juga merupakan prioritas. Agar dapat menangani pelanggaran hak asasi manusia secara lebih efektif, lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan harus diperkuat. Hal ini memerlukan penguatan kapasitas, independensi dan integritas lembaga-lembaga tersebut, serta perlindungan hukum yang ketat terhadap pelanggaran hak asasi manusia tanpa diskriminasi.
- c) Partisipasi masyarakat juga memegang peranan yang sangat penting dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Keterlibatan masyarakat dalam proses kepolisian dan pemajuan hak asasi manusia memungkinkan adanya kepercayaan dan legitimasi dalam sistem hukum. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, baik sebagai pengamat, saksi, maupun pelapor, proses hukum dapat menjadi lebih terbuka, inklusif, dan adil.
- d) Pendidikan dan kesadaran akan hak asasi manusia juga merupakan langkah yang sama pentingnya. Melalui pendidikan formal dan kampanye informasi, masyarakat dapat lebih memahami hak-hak mereka dan pentingnya melindungi hak asasi manusia. Dengan meningkatkan kesadaran ini, diharapkan masyarakat akan lebih aktif memperjuangkan hak-haknya dan memberikan respons yang lebih baik terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar mereka.

Secara keseluruhan, langkah-langkah ini membentuk kerangka komprehensif untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, diharapkan upaya hak asasi manusia menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Hanya dengan komitmen dan kerja sama semua pihak, Indonesia bisa menjadi negara yang berbudaya hak asasi manusia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan setiap individu.

### **Tantangan Utama yang Dihadapi dalam Menegakkan Keadilan Sosial di Era Modern, Baik dari Segi Hukum maupun Masyarakat**

Keadilan sosial merupakan konsep yang sangat penting dalam masyarakat modern, menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk kesempatan, perlakuan adil, dan akses yang setara terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup yang layak. Dalam konteks ini, hukum memainkan peran yang krusial dalam mengatur hubungan antara individu-individu tersebut dan memastikan penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial. Sejak berdirinya negara-negara modern, prinsip keadilan sosial telah menjadi salah satu pilar utama dalam penyusunan konstitusi dan undang-undang. Namun, kenyataannya seringkali berbeda dengan harapan, dengan ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik yang masih dalam tingkat yang mendalam di banyak negara di seluruh dunia. Bahkan, dalam beberapa kasus, ketidaksetaraan tersebut semakin memburuk, memicu ketegangan sosial dan konflik. Dalam beberapa tahun terakhir, isu-isu yang berkaitan dengan keadilan sosial telah mendapat perhatian yang lebih besar. Gerakan-gerakan sosial, aktivis, dan organisasi hak asasi manusia di seluruh dunia telah secara aktif menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Namun, dalam upaya untuk mewujudkan keadilan sosial, peran hukum sering kali menjadi pusat perdebatan yang hangat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial. Paper ini akan menjelaskan mengapa hukum memiliki relevansi yang besar dalam mencapai tujuan keadilan sosial dan sejauh mana hukum telah berhasil atau gagal dalam upaya ini.

Tantangan utama dalam menegakkan keadilan sosial saat ini melibatkan berbagai aspek baik dari segi hukum maupun sosial. Di sisi hukum, salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya akses terhadap sistem hukum. Meskipun prinsip-prinsip keadilan sosial telah diakui secara luas, banyak masyarakat yang masih belum dapat mengakses layanan hukum yang berkualitas karena kendala ekonomi atau geografis. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam keadilan dimana mereka yang memiliki sumber daya lebih banyak cenderung menerima perlakuan yang lebih baik dalam sistem hukum. Selain itu, proses peradilan yang lambat dan rumit juga menjadi tantangan yang seringkali berujung pada tertundanya penyelesaian perkara dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Di sisi masyarakat, tantangan terbesar adalah kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka dan kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka. partisipasi dalam kasus-kasus pengadilan. proses hukum Banyak masyarakat yang tidak memahami haknya atau tidak mampu memperjuangkan haknya. Selain itu, kepercayaan terhadap sistem hukum dan lembaga penegak hukum rendah karena korupsi, diskriminasi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat melemahkan penegakan hukum dan menghambat terwujudnya keadilan sosial.

Selain itu, perbedaan nilai dan norma budaya juga dapat menjadi kendala dalam mencapai konsensus mengenai apa yang dimaksud dengan keadilan sosial antar masyarakat yang berbeda. Mengatasi tantangan tersebut memerlukan langkah komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak. Reformasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan layanan hukum, mempercepat proses hukum dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum sangatlah penting. Selain itu, pendidikan hukum dan advokasi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab hukum seseorang. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan kebijakan hukum juga dapat menjamin bahwa kepentingan masyarakat terwakili dan dipertimbangkan pada setiap tahapan kebijakan. Oleh karena itu, dengan upaya bersama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat di era modern ini, tantangan dalam menjaga keadilan sosial dapat diatasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

### **Penegakan Keadilan Sosial Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 Mengenai Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas**

Melindungi hak-hak penyandang disabilitas adalah bagian penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan adil. Setiap orang, apapun kemampuan fisik dan mentalnya, mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Untuk mencapai hal ini diperlukan kebijakan dan undang-undang yang menjamin aksesibilitas, kesempatan kerja yang adil, pendidikan inklusif dan perlindungan terhadap diskriminasi dan stigma. Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwasannya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Artinya, setiap orang berhak untuk mengetahui hukum yang berlaku dan berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum harus adil dan tidak memihak, serta harus diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif.

Banyak penyandang disabilitas di panti yang terjebak di panti selama puluhan tahun dan tidak bisa keluar dari panti asuhan. Penelitian yang dilakukan Human Rights Watch menunjukkan bahwa pada tahun 2016, mereka menemukan 65 orang ditahan secara sewenang-wenang di RSJ, institusi, dan fasilitas pengobatan tradisional. Sebagai rumah sakit jiwa, tidak ada batasan berapa lama seseorang bisa dirawat di fasilitas ini. Meski kondisi kejiwaan mereka stabil. Penyandang disabilitas perkembangan tidak dapat meminta atau memutuskan sendiri untuk keluar dari lembaga tersebut.

Di Indonesia, pengampuan tampaknya masih dibutuhkan dalam beberapa kasus, tetapi ini tidak berarti bahwa setiap individu dengan disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual harus secara otomatis ditempatkan di bawah pengampuan atau disamakan dengan kategori seperti "bodoh", "sakit jiwa", atau "gila". Terutama untuk mereka yang mengalami disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, tetapi dalam kondisi tertentu dapat menunjukkan kemampuan hukum atau berada dalam kondisi yang baik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penyamaan antara istilah "bodoh", "sakit jiwa", dan "gila" dengan istilah "disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual" bisa menyebabkan semua individu dalam kategori ini dianggap tidak mampu, dan

bahkan harus ditempatkan di bawah pengampunan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 433 KUH Perdata. Pengampunan untuk seseorang dengan gangguan jiwa yang bersifat permanen dirancang untuk memberikan perlindungan dalam tindakan hukum karena mereka dianggap tidak cakap sepanjang waktu.

Menerapkan hak asasi manusia terhadap disabilitas berarti menciptakan lingkungan yang mendorong dan memberdayakan. Hal ini mencakup penyediaan layanan aksesibilitas seperti akses jalan, transportasi dan teknologi pendukung. Undang-Undang NRI Tahun 1945 dan konvensi hak-hak penyandang disabilitas sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan di hadapan undang-undang disabilitas dan memastikan bahwa semua warga negara penyandang disabilitas menikmati hak yang sama sebagai subjek hukum di semua bidang kehidupan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 yang disahkan memuat perubahan amnesti. Tujuan pemberian amnesti bagi penderita gangguan jiwa tetap adalah untuk melindungi orang yang diberi kuasa menurut hukum, karena menurutnya penderita cacat tetap dianggap tidak cakap sepanjang hari. Terlepas dari kebijakan pemerintah, masyarakat memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Kesadaran dan penerimaan di tingkat sosial membantu mengurangi hambatan psikologis dan memperkuat nilai-nilai inklusi. Pelatihan dan kampanye informasi dapat menghilangkan stereotip dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas. Ketika semua orang dihargai dan diberikan kesempatan yang sama, kita semua mendapat manfaat dari keberagaman dan kontribusi unik.

## **KESIMPULAN**

Di era tantangan dan dinamika yang kompleks saat ini, implikasi hukum dan peran masyarakat dalam menjaga keadilan sosial menjadi semakin penting. Tantangan-tantangan utama baik dari sudut pandang hukum maupun sosial, seperti kurangnya akses terhadap keadilan, kurangnya hak hukum dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan, memerlukan tanggapan yang efektif dan kolaboratif dari berbagai pihak. Reformasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan hukum, mempercepat proses peradilan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan perannya dalam proses hukum, dapat memperkuat implementasi keadilan sosial. Keadilan. Komitmen bersama antara pemerintah, lembaga peradilan, masyarakat sipil, dan sektor swasta diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan memberdayakan semua orang di era modern yang terus berubah.

Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat sipil, diharapkan upaya untuk melindungi hak asasi manusia menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Komitmen dan kerja sama dari semua pihak diperlukan agar Indonesia dapat menjadi negara yang menghargai hak asasi manusia dan menjunjung tinggi martabat setiap individu. Melindungi hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan mereka. Hal ini melibatkan penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses jalan, transportasi, dan teknologi pendukung. Selain itu, perusahaan dan institusi pendidikan perlu memberikan kesempatan yang setara kepada penyandang disabilitas untuk bekerja

dan belajar. Di luar peran pemerintah, masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam melindungi hak-hak ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menjaga keadilan sosial di era modern memerlukan kerja sama dan komitmen bersama antar berbagai sektor ekonomi. Reformasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Hanya dengan mengatasi tantangan-tantangan kompleks ini bersama-sama kita dapat memperkuat landasan keadilan sosial dan menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat hidup dengan martabat dan setara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Soerjono Soekamto.(1983). *Bantuan Hukum, Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indah.
- C.S.T. Kansil. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mulyana, Deddy. (2020). *Human Communication*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mahendra, A. P. (2020). *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-XX/2022.
- Siregar, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Di Tengah Konflik Sosial Di Indonesia. *Tugas Mahasiswa Fakultas Hukum, 1*(2).
- Latuperisa, Y. K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Tugas Mahasiswa Fakultas Hukum, 1*(2).
- Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5*(1), 241-254.
- Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara. *Indonesian Journal of Law and Justice, 1*(4), 12-12.
- Giyono, U. (2020). Kajian Kritis Hubungan Hukum Dan Moral Dalam Paradigma Positivisme Hukum. *Jurnal Yustitia, 21*(2).
- Lestari, A. P., Adhita, M. M., Ikhsani, L. N., & Pratama, M. A. (2024). Kondisi Hukum dan Keadilan di Era Hellenistic: Tinjauan Sejarah dan Filosofi. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 1*(02).